

Tatanan Dunia Multipleks Dan Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto

Asrudin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satyagama
Jl. Kamal Raya No. 2A, Jakarta, Indonesia, 11730

email: asrudin@satyagama.ac.id

Abstract

The liberal international order was initially established by European powers in the 19th century and further developed by the United States after World War II, the deadliest conflict in human history. This concept refers to a rules-based system designed to govern international relations and legitimize American hegemony. However, this order began to shake after Donald Trump occupied the White House. Trump withdrew America's full involvement in international affairs, considering them misaligned with national interests. His administration withdrew from several UN organizations, including the Human Rights Council, UNESCO, UNRWA, and WHO. Additionally, he pulled the U.S. out of the Paris Agreement on Climate Change and halted all foreign aid. He initiated a tariff war against multiple countries, which significantly undermined the liberal international order. This shift has given rise to what Amitav Acharya describes as a multiplex world order. This article will explore the multiplex world order and discuss how the Prabowo government should respond through Indonesia's foreign policy. To achieve this research objective, a qualitative research method is employed. This approach allows the author to collect, analyze, and interpret non-numerical data, facilitating a deeper understanding of the core aspects of this article's research.

Keywords —Donald Trump, The Liberal international Order, Multiplex World Order, Indonesia's foreign policy, Prabowo.

Abstrak

Tatanan internasional liberal awalnya didirikan oleh negara-negara Eropa pada abad ke-19 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Konsep ini mengacu pada sistem "berbasis aturan" yang dirancang untuk mengatur hubungan internasional dan melegitimasi hegemoni Amerika. Namun, tatanan ini mulai goyah setelah Donald Trump menduduki Gedung Putih. Melalui berbagai kebijakan, Trump menarik keterlibatan penuh Amerika dalam urusan internasional, yang dianggapnya tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Pemerintahannya menarik diri dari beberapa organisasi PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia, UNESCO, UNRWA, dan WHO. Selain itu, ia menarik AS keluar dari Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan menghentikan semua bantuan asing. Mungkin yang paling menonjol, ia memulai perang tarif terhadap banyak negara, yang secara signifikan merusak tatanan internasional liberal. Pergeseran ini telah memunculkan apa yang digambarkan oleh Amitav Acharya sebagai tatanan dunia multipleks. Artikel ini akan membahas tatanan dunia multipleks dan bagaimana pemerintah Prabowo harus menanggapiinya melalui kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk mencapai sasaran penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik, sehingga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek inti penelitian artikel ini.

Kata Kunci —Donald Trump, tatanan internasional liberal, tatanan dunia multipleks, kebijakan luar negeri Indonesia, Prabowo.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kita berada di titik puncak momen penataan ulang dalam hubungan internasional yang sama pentingnya dengan tahun 1919, 1945, dan 1989—peristiwa lintas generasi. Seperti episode-episode sebelumnya, berakhirnya tatanan internasional liberal (TIL) yang mulai terbentuk pada 1990-an adalah momen yang sarat dengan harapan dan ketakutan, karena kepastian lama, yang buruk maupun yang baik, telah menguap. Momen-momen penting seperti itu adalah momen di mana para oportunis yang karismatik, bukan operator yang kompeten, bersinar terang (Gilman, 2025).

Banyak ilmuwan hubungan internasional yang menyebut momen penting itu terjadi ketika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Saat Trump terpilih pertama kali menjadi presiden Amerika pada November 2016, TIL Amerika Serikat – kependekan dari sistem lembaga, norma, dan aturan yang mulai muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II dan puncaknya pada akhir Perang Dingin – berada dalam masalah besar. Seperti lempeng tektonik yang bergerak, TIL kehilangan penopangnya, menyebabkan guncangan besar dalam politik global.

Delapan tahun kemudian (2024), Trump kembali terpilih. Ia datang ke Gedung Putih tetap dengan membawa serta visi-misi kebijakan luar negeri pertama-nya. Dia teguh pendirian dengan menjaga jarak dari TIL karena dianggap merugikan kepentingan nasional. Kebijakan ini diambil Trump dengan menarik AS dari perjanjian iklim Paris, menghengkannya AS dari WHO, mengenakan tarif baru yang tinggi pada mitra dagangnya, ancaman untuk menangkap dan mengusir jutaan imigran tidak berdokumen, serta menghentikan bantuan luar negeri. Dia telah mengubah secara fundamental cara kerja politik luar negeri Amerika yang paling berkuasa di dunia tersebut.

Trump menyebut berbagai rangkaian kebijakan luar negeri-nya itu sebagai "America First" (Azwar, 2017; Azwar, 2025: 11). Doktrin Trump ini intinya adalah mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dasar politiknya: kesetiaan total kepada Amerika. Melalui doktrin ini, Trump ingin mengembalikan AS ke dunia politik keseimbangan kekuatan yang ingin dihindari oleh para arsitek tatanan internasional liberal. Baginya ini adalah dunia kekuasaan tanpa batas yang diatur oleh rasa takut alih-alih kepercayaan, di mana yang kuat melakukan apa yang mereka mau, sementara yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.

Dia menduduki Gedung Putih rupanya untuk memandang dunia dengan cara yang berbeda dari pendahulunya Joe Biden, dan pendekatannya ini akan mengubah hubungan AS dengan dunia luar. Tidak seperti Biden, yang memandang dunia sebagai papan catur raksasa dengan blok yang bersahabat dan bermusuhan yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan geopolitik atas wilayah yang diperebutkan, Trump melihatnya lebih sebagai papan Monopoli raksasa, dengan banyak aktor yang bersaing memperebutkan *real estate*, pasar, dan sumber daya yang berharga. Di bawah Biden, ideologi didahulukan: demokrasi, kepatuhan terhadap aturan hukum, dan kepatuhan terhadap 'nilai-nilai Barat' dianggap sebagai perekat NATO dan aliansi lain yang dipimpin AS. Trump mengatakan bahwa pengejaran keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan strategis harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS (Michael T Klare, 2025).

Itu artinya, kebijakan luar negeri Trump tentang "America First" mencari jalur yang berbeda dari kebiasaan *policy maker* di Amerika dalam melindungi kepentingan Amerika. Dia menganggap bahwa negara lain, baik sekutu atau pun musuh Amerika, telah menuai manfaat substansial dari tatanan internasional liberal yang terbuka, dan mereka memanfaatkan tatanan ini untuk mengambil keuntungan dari Amerika Serikat.

Dengan kebijakannya itu dapat dikatakan bahwa Trump resmi mengakhiri TIL. Dunia kini telah memasuki era yang disebut oleh Amitav Acharya (2014, 2017, 2018, 2023) sebagai tatanan dunia Multipleks (TDM). Dalam TDM, dunia tak lagi berada di dalam genggaman Amerika Serikat. Sebab dunia Multipleks adalah dunia multi aktor – dunia yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan tunggal Amerika atau kekuatan-kekuatan Utara (*Global North*), melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan Selatan (*Global South*), dan berbagai aktor lainnya. Gagasan Acharya mengenai TDM akan dijadikan rujukan penting penelitian artikel ini karena mendorong *global south* untuk lebih berani tampil dalam panggung politik global.

Dalam konteks ini, Indonesia yang merupakan bagian dari *Global South*, dalam hemat penulis, mesti menyambut dorongan Acharya tersebut dengan ikut mengambil peran lebih dalam membentuk bulat dan lonjongnya arena politik global. Artikel ini mencoba menguraikan tantangan kebijakan luar negeri Indonesia seperti apa yang akan dihadapi Prabowo Subianto dan sikap seperti apa yang mesti diambil Indonesia di tengah tatanan dunia yang multipleks.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, dalam melakukan penelitian, objek yang diteliti harus terlebih dahulu memiliki sebuah masalah. Dalam kaitan itu, mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian menjadi suatu keharusan. Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang, artikel ini telah menguraikan sedikit gambaran mengenai berakhirnya tatanan internasional liberal dan munculnya tatanan dunia multipleks.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang ingin dijawab artikel ini: 1. Mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk

meninggalkan sekaligus mengakhiri tatanan internasional liberal; 2. Menyikapi berakhirnya tatanan internasional liberal, artikel ini akan mengelaborasi gagasan Amitav Acharya mengenai tatanan dunia multipleks yang menggantikannya, dan menguraikan langkah strategis seperti apakah yang mesti diambil pemerintah Indonesia dalam menyikapi tatanan dunia yang multipleks seperti itu?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu latar belakang yang menggerakkan kebijakan Presiden Amerika Donald Trump mengakhiri tatanan internasional liberal. Kita juga tahu bahwa sejak Trump mengakhiri tatanan tersebut, muncul-lah tatanan dunia multipleks. Tatanan tersebut kini telah membentuk bulat dan lonjongnya cara kerja politik global. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyikapi tatanan dunia multipleks. Lebih tepatnya bagaimana seharusnya kebijakan luar negeri Prabowo menyikapi tatanan dunia yang multipleks.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian: teoretis dan praktis. Pertama, penelitian artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai liberalisme, tatanan internasional liberal dan tatanan dunia multipleks. Selain itu, penelitian artikel ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait tema yang serupa. Kedua, para penstudi hubungan internasional di Indonesia dan praktisi kebijakan luar negeri Indonesia diharapkan bisa memahami duduk persoalan tatanan dunia kontemporer. Seperti dikupas artikel ini bahwa tatanan dunia kini tidak lagi mengambil bentuk liberal, di mana Amerika Serikat berperan sebagai pemimpin tunggal global, melainkan berbentuk multipleks, dunia yang berisi banyak aktor. Dengan pemahaman yang demikian, para penstudi hubungan internasional dapat ikut

serta memberikan solusi praktis atas tatanan dunia tersebut dan para praktisi kebijakan luar negeri Indonesia juga bisa merumuskan strategi kebijakan luar negeri yang tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan nasional.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Liberalisme

Secara etimologi, istilah “liberalisme”, berasal dari kata Latin “liber” yang artinya “bebas”, atau berhubungan dengan cita-cita kebebasan individu. Kata liberalisme juga memiliki landasan sejarah yang sangat berharga dalam tradisi dan pengalaman, serta warisan literatur yang kaya dan luas dalam falsafah sosial, pemikiran politik, *belles-lettres* (jenis karya sastra yang menekankan pada aspek keindahan daripada pesan yang ingin disampaikan), dan lain-lain (Von Mises, 1985: v & xiv). Liberalisme didasarkan pada argumen moral bahwa memastikan hak individu untuk hidup, kebebasan, dan harta benda adalah tujuan tertinggi pemerintah. Akibatnya, kaum liberal menekankan kesejahteraan individu sebagai blok bangunan fundamental dari sistem politik yang adil. Sistem politik yang dicirikan oleh kekuasaan yang tidak terkendali, seperti monarki atau kediktatoran, tidak dapat melindungi kehidupan dan kebebasan warga negaranya. Oleh karena itu, perhatian utama liberalisme adalah membangun lembaga yang melindungi kebebasan individu dengan membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Bagi kaum liberal, pengawasan kelembagaan utama terhadap kekuasaan di negara liberal adalah pemilihan umum yang bebas dan adil yang melaluinya rakyat dapat menyingkirkan penguasa mereka dari kekuasaan, yang memberikan pengawasan mendasar terhadap perilaku pemerintah. Keterbatasan penting kedua terhadap kekuasaan politik adalah pembagian kekuasaan politik di antara

berbagai cabang dan tingkat pemerintahan – seperti parlemen/kongres, eksekutif, dan sistem hukum. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan dan keseimbangan dalam penggunaan kekuasaan (Meiser, 2018).

Sistem liberalisme mendapatkan popularitasnya di Eropa dan di Amerika Serikat. Sebab liberalisme menawarkan masyarakatnya kebebasan, kemakmuran, tumbuhnya demokrasi, perdamaian, dan banyak lagi. Oleh karena itu, sejumlah teoretikus politik dan hubungan internasional kemudian memadukan kata “liberal” dan “demokrasi” menjadi satu kesatuan: demokrasi liberal.

Padahal kedua kata itu, menurut Marc F. Plattner (1998: 172), adalah dua elemen yang berbeda dalam pengertian yang lebih tegas. Seperti yang dimaksudkan oleh turunan katanya, makna paling dasar dari kata demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan demikian, demokrasi berbeda dari monarki (kekuasaan satu orang), aristokrasi (kekuasaan orang terbaik), dan oligarki (kekuasaan pada sebagian orang). Dalam dunia modern, ketika ukuran suatu negara tidak memungkinkan terlaksananya demokrasi secara langsung seperti yang pernah dipraktikkan oleh beberapa republik masa lampau, pemilihan wakil rakyat dan pejabat publik lainnya adalah mekanisme utama yang dengannya rakyat menjalankan kekuasaannya. Kini demokrasi makin diartikan sebagai hak pilih yang dimiliki semua rakyat secara umum dan masyarakat untuk mengemban sebuah jabatan. Oleh karenanya, pemilihan umum dianggap sebagai aspek populer atau utama dari demokrasi liberal masa kini.

Kata “liberal” dalam frasa demokrasi liberal sendiri tidak mengacu pada siapa yang berkuasa tetapi pada bagaimana kekuasaan dijalankan. Liberalisme menghendaki pemerintah dibatasi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaannya. Pemerintah dibatasi oleh aturan hukum, khususnya oleh hukum dasar atau konstitusi. Namun, utamanya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh

hak-hak setiap individu. Konsep hak alamiah atau hak yang tidak dapat dicabut, yang sekarang lebih umum disebut sebagai “hak asasi manusia”, berasal dari liberalisme. Keutamaan hak asasi manusia berarti bahwa perlindungan terhadap wilayah pribadi, serta kemajemukan dan beragam tujuan yang dikehendaki manusia dalam pengejaran kebahagiaan mereka, merupakan unsur penting dari tatanan politik liberal (Plattner, 1998: 172).

Meski begitu, Plattner mengakui bahwa demokrasi dan liberalisme bukannya tidak dapat dipisahkan. Terbukti terdapat jejak sejarah adanya negara demokrasi non-liberal dan negara non-demokrasi yang liberal. Demokrasi pada zaman kuno, walaupun penduduknya lebih terlibat dalam pemerintahan dibandingkan dengan kita pada masa kini, tidak menyediakan kebebasan berpendapat dan beragama, perlindungan atas kepemilikan pribadi, atau pemerintahan berdasarkan konstitusi. Di sisi lain, tempat kelahiran liberalisme, Inggris yang modern, hingga abad ke-19 masih sangat membatasi hak suara masyarakat. Dalam hal ini, Plattner bersepakat dengan Fareed Zakaria yang menyebut Inggris memiliki contoh klasik demokratisasi dengan perluasan hak pilih secara bertahap setelah lembaga-lembaga penting liberalisme konstitusional dibentuk. Zakaria juga menyebut Hongkong di bawah aturan kolonial Inggris, sebagai contoh liberalisme yang tumbuh subur tanpa demokrasi (Zakaria, 1997).

Plattner juga mengakui walaupun “pembongkaran” unsur-unsur penyusun demokrasi liberal modern adalah langkah pertama yang penting dalam memahami karakternya, perbedaan liberalisme dan demokrasi yang berlebihan dapat berujung pada kesalahpahaman baru. Meski banyak negara demokrasi pemilihan umum baru yang tidak begitu liberal, secara keseluruhan, negara-negara yang menyelenggarakan pemilihan yang bebas jauh lebih liberal daripada yang tidak, dan negara-negara yang

melindungi kebebasan sipil lebih mungkin menyelenggarakan pemilihan yang bebas daripada negara-negara yang tidak.

2.1.2 Tatanan Internasional Liberal

Meskipun istilah liberalisme lebih merupakan masalah politik dalam negeri, ranah hubungan internasional juga penting bagi kaum liberal karena aktivitas suatu negara di luar negeri dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebebasan di dalam negeri. Kaum liberal khususnya terganggu oleh kebijakan luar negeri yang bersifat militeristik. Perhatian utamanya adalah bahwa perang mengharuskan negara untuk membangun kekuatan militer. Kekuatan ini dapat digunakan untuk melawan negara asing, tetapi juga dapat digunakan untuk menindas warga negaranya sendiri. Karena alasan ini, sistem politik yang berakar pada liberalisme sering kali membatasi kekuatan militer dengan cara-cara seperti memastikan kontrol sipil atas militer. Perang ekspansi teritorial, atau imperialisme – ketika negara berupaya membangun kekaisaran dengan mengambil alih wilayah di luar negeri – sangat mengganggu bagi kaum liberal. Perang ekspansionis tidak hanya memperkuat negara dengan mengorbankan rakyat, perang ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap pendudukan militer dan kendali politik atas wilayah dan rakyat asing. Pendudukan dan kendali membutuhkan birokrasi besar yang berkepentingan dalam mempertahankan atau memperluas pendudukan wilayah asing (Meiser, 2018). Dalam konteks itu, membentuk tatanan internasional liberal, bagi kaum liberal, menjadi sangat penting.

Tatanan internasional liberal sendiri awalnya muncul di Eropa pada abad ke-19 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, serta mengalami puncaknya ketika Perang Dingin berakhir. Konsep ini mengacu pada sistem “berbasis aturan” yang dirancang untuk mengatur hubungan internasional dan

melegitimasi hegemoni Amerika (Ikenberry, 2011; Ikenberry, 2011: 56). Aspek lain dari tatanan ini mengarahkan perhatian pada nilai-nilai dan norma-norma liberal, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme pasar bebas. Jadi, dapat dikatakan bahwa TIL menggabungkan kapitalisme, demokrasi, dan multilateralisme di bawah hegemoni AS. Mengacu pada definisi itu, maka nilai-nilai liberal menjadi kata kunci bagi tatanan internasional yang dibangun oleh Amerika.

Kaum liberal modern umumnya berpendapat bahwa politik global membutuhkan tingkat integrasi politik baru sebagai respons terhadap saling ketergantungan yang terus meningkat. Namun, tatanan politik global tidak muncul secara spontan, dan kaum liberal meyakini bahwa dunia dengan negara kapitalis demokratik yang lebih liberal akan lebih damai, sejahtera, dan menghormati hak asasi manusia. Bukanlah hal yang tak terelakkan bahwa sejarah akan berakhir dengan kemenangan liberalisme, tetapi tidak dapat dielakkan bahwa tatanan dunia yang layak akan bersifat liberal (Deudney & Ikenberry, 2018: 16; Fukuyama, 1989 & 1992; Deudney & Ikenberry, 1999: 179-196).

Dengan demikian, kaum liberal modern merangkul pemerintahan demokratis, sistem ekonomi berbasis pasar, dan lembaga internasional bukan karena idealisme, tetapi karena mereka percaya bahwa pengaturan ini lebih cocok untuk mewujudkan kepentingan manusia di dunia modern daripada alternatif apa pun. Memang, dalam memikirkan tatanan dunia, variabel yang paling penting bagi para pemikir liberal adalah saling ketergantungan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lembaga global kini diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dasar manusia; bentuk saling ketergantungan yang intens yang dulunya hanya ada dalam skala yang lebih kecil kini hadir dalam skala global. Misalnya, sementara masalah lingkungan dulunya sebagian besar tertahan di dalam negara atau wilayah, efek kumulatif aktivitas manusia pada sistem

pendukung kehidupan biosfer planet ini kini begitu besar sehingga membutuhkan nama geologis baru untuk periode waktu saat ini—Antroposen (Deudney & Ikenberry, 2018: 17).

Secara keseluruhan, liberalisme tetap menarik secara universal karena berlandaskan pada komitmen terhadap martabat dan kebebasan individu. Liberalisme mengukuhkan gagasan toleransi, yang akan sangat dibutuhkan seiring dengan semakin interaktifnya dunia dan keberagamannya. Meskipun ideologi ini muncul di Barat, nilai-nilainya telah menjadi universal, dan para pendukungnya telah meluas hingga mencakup Mahatma Gandhi, Mikhail Gorbachev, dan Nelson Mandela. Dan meskipun imperialisme, perbudakan, dan rasisme telah merusak sejarah Barat, liberalisme selalu menjadi yang terdepan dalam upaya—baik yang damai maupun militan—untuk mereformasi dan mengakhiri praktik-praktik ini. Sejauh mana lengkungan sejarah yang panjang mengarah ke keadilan, hal itu terjadi berkat aktivisme dan komitmen moral kaum liberal (Deudney & Ikenberry, 2018: 18).

Inilah yang membedakan liberalisme dengan para pesaingnya yang nasionalis dan realis yang berpandangan ke belakang. Liberalisme memiliki kemampuan beradaptasi dan kecenderungan untuk inovasi kelembagaan yang sangat penting untuk menanggapi tantangan yang muncul seperti kecerdasan buatan, perang siber, dan rekayasa genetika (Deudney & Ikenberry, 2018: 17-18). Ringkasnya, keunikan yang dimiliki tatanan internasional liberal ada pada kemampuannya untuk mengoreksi diri.

Itulah mengapa, selama lebih dari tujuh dekade, tatanan internasional liberal telah memberikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan — daripada tatanan lain mana pun di dalam sejarah dunia. Tatanan internasional liberal telah memberikan kerangka kerja bagi masyarakat industri yang berjuang di Eropa dan di tempat lain untuk mengubah diri mereka menjadi demokrasi sosial modern. Jepang dan Jerman Barat,

misalnya, diintegrasikan ke dalam komunitas keamanan bersama dan kemudian membentuk identitas nasional yang berbeda sebagai kekuatan besar yang damai. Eropa Barat meredam kebencian lama dan meluncurkan proyek besar persatuan. Pemerintahan kolonial Eropa di Afrika dan Asia sebagian besar berakhir. Sistem kerja sama G-7 antara Jepang, Eropa, dan Amerika Utara telah membantu pertumbuhan dan mengelola serangkaian krisis perdagangan dan keuangan. Mulai tahun 1980-an, negara-negara di Asia Timur, Amerika Latin, dan Eropa Timur membuka sistem politik dan ekonomi mereka dan bergabung dalam tatanan internasional liberal. Amerika Serikat mengalami keberhasilan terbesarnya sebagai kekuatan dunia, yang berpuncak pada akhir damai bagi Perang Dingin, dan negara-negara di seluruh dunia menginginkan lebih banyak, bukan sedikit, kepemimpinan Amerika. Para pemimpin Amerika di masa lalu memahami bahwa masalah-masalah global menuntut solusi global dan mulai membangun jaringan aliansi dan institusi multilateral di seluruh dunia (Ikenberry, 2020: 136).

Tetapi soalnya, kata G. John Ikenberry, di bawah tatanan internasional liberal, Amerika telah melakukan intervensi terlalu banyak, mengatur terlalu sedikit, dan memberikan lebih sedikit dari yang dijanjikan. Akibatnya kebijakan liberal menghasilkan krisis keuangan dan meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi; tatanan ini juga membangkitkan intervensi militer yang menghancurkan dan perang yang tak berkesudahan.

Mark Leonard (2025) menambahkan tatanan internasional liberal tidak dapat disebut liberal setelah kekejaman Amerika terjadi di penjara Abu Ghraib, Irak, dan di Teluk Guantanamo, Kuba; tidak dapat disebut internasional ketika banyak bagian dunia masih terperosok dalam perang saudara; dan karena kegagalan ini, hal itu tidak dapat disebut sebagai tatanan. Ini lebih menyerupai tatanan berbasis pengecualian, bukan tatanan berbasis aturan. Menurut Leonard, Trump

memahami hal ini. Dia memanfaatkan rasa frustrasi masyarakat terhadap para elit yang berpura-pura memiliki semua jawaban, tetapi secara konsisten gagal melakukan apa yang telah mereka janjikan.

Boleh jadi ada yang menganggap keliru kalau tatanan internasional liberal bermasalah hanya karena retorika atau kebijakan Trump (Mearsheimer, 2019: 7) Namun, sejak Trump menduduki Gedung Putih, dia berhasil meluluhlantakkan tatanan internasional liberal nyaris tanpa sisa. Tidak sedikit analis hubungan internasional yang bersepakat dan tegas mengatakan bahwa kebijakan “America First” Trump telah mengakhiri tatanan internasional liberal dan membawa Amerika ke dalam isolasionisme, proteksionisme, nasionalisme, dan transaksionalisme.

2.1.3 Tatanan Dunia Multipleks

Akhir dari tatanan internasional liberal telah membuat Amerika absen dalam banyak persoalan global. Di sini aktor-aktor lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan mulai mengambil kekosongan peran internasional Amerika. Dunia kini memiliki lebih banyak aktor internasional yang ikut berperan dalam membentuk bulat dan lonjongnya panggung politik global dengan beragam pilihan kebijakan internasional.

Dunia yang dipenuhi oleh banyak aktor itu disebut oleh Amitav Acharya sebagai dunia multipleks.

Tatanan dunia multipleks yang dimaksud oleh Acharya adalah konsep yang menggambarkan tatanan global yang dicirikan oleh beragamnya aktor, baik negara maupun non-negara, serta beragamnya gagasan dan pendekatan terhadap tantangan global, alih-alih hanya didominasi oleh satu kekuatan atau ideologi dominan. Hal ini menandakan pergeseran dari tatanan dunia yang didominasi oleh satu kekuatan atau sekelompok kecil kekuatan menjadi tatanan di mana berbagai aktor—termasuk negara, organisasi internasional, badan regional, perusahaan, dan

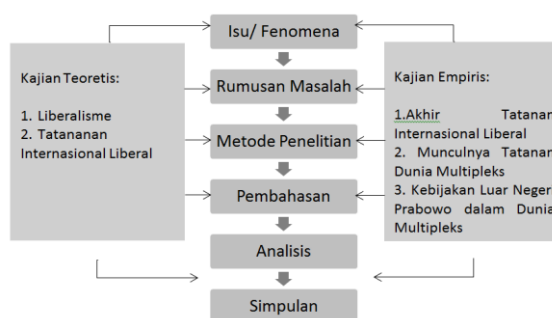
gerakan sosial—berinteraksi dan memengaruhi urusan global.

Untuk memahami lebih jauh tatanan dunia multipleks Acharyaian secara lebih menyeluruh, artikel ini akan menguraikannya lebih lanjut secara empirik di dalam sub-bab hasil dan pembahasan. Tatanan dunia multipleks ini penulis jadikan sandaran untuk memahami kerja politik global dan bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto menyikapi tatanan dunia multipleks tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah panduan yang membantu peneliti tetap fokus pada cakupan studi mereka. Kerangka ini menyediakan struktur untuk menerapkan langkah-langkah proses penelitian dan memastikan bahwa setiap fase dibangun berdasarkan fase sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran dalam penelitian artikel ini dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar I. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Pribadi

3. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data non-numerik. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami bagaimana seseorang secara

subjektif memandang dan memberi makna pada realitas sosialnya. Menurut Catherine Cassell dan Gillian Symon (seperti dikutip Cipto, 2003: 32) metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis atau terucapkan. Di samping itu, ia juga berusaha memberikan gambaran utuh dan menyeluruh tentang situasi yang sedang dipelajari oleh peneliti mengenai realitas sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research* (Nurrahman & Triwahyuni, 2024: 141). Untuk jenis datanya adalah data sekunder dari literatur-literatur yang relevan dalam jurnal ilmiah, buku-buku yang memuat hasil penelitian terdahulu, dan media (cetak dan online) yang berhubungan dengan masalah penelitian dalam artikel ini.

Sementara itu, teknik analisis data artikel ini adalah deskriptif-analitis. Melalui teknik ini, data yang ada dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan, lalu dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Jika dalam teknik deskriptif hanya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dari adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain, maka dalam teknik deskriptif-analitis, tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, akan tetapi meliputi analisis interpretasi dari data tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Akhir Tatanan Internasional Liberal

Presiden Trump tidak menyukai tatanan internasional liberal yang multilateralis dan lebih memilih tindakan unilateral dan hubungan bilateral. Multilateralisme membutuhkan waktu, sering kali melibatkan kompromi kepentingan pribadi yang sempit, dan membutuhkan subsidi dari negara-negara yang lebih kaya dan lebih berkuasa untuk menanggung biaya pengaturan multilateral. Tak satu pun dari aspek-aspek ini – kesabaran,

kompromi, atau penanggungan biaya – yang konsisten dengan kebijakan “America First” yang diretorika-kan selama kampanye Trump untuk kursi kepresidenan atau dengan pemikiran banyak anggota kabinetnya baru-baru ini (Biersteker, 2025).

Seperti sudah dikatakan diawal bahwa Trump ketika terpilih, baik periode pertama atau pun kedua, ingin menarik sepenuhnya keterlibatan AS dalam urusan internasional yang dinilainya tidak bersejalan dengan kepentingan nasional. Padahal di bawah TIL, AS dituntut untuk aktif dan terlibat lebih jauh dalam persoalan-persoalan internasional dan kerja sama global.

Masa jabatan pertama Trump ditunjukkan dengan menentang kebijakan dari presiden-presiden pendahulunya. Pemerintahannya telah menarik Amerika dari Perjanjian iklim Paris, menarik dari organisasi-organisasi PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia, UNESCO, UNRWA, dan WHO. Pemerintahannya menarik pendanaan dari Organisasi Kesehatan Dunia selama pandemi COVID, melemahkan jaminan keamanan yang terkait dengan NATO (argumen yang sering ia ulangi dalam kampanye keduanya), dan melemahkan efektivitas WTO, membongkar sistem penyelesaian sengketa dengan menghalangi pengangkatan hakim-hakim baru untuk Badan Banding WTO (Biersteker, 2025).

Tak hanya itu, Trump juga menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang dimaksudkan untuk membatasi potensi persenjataan program nuklir Iran pada tahun 2018, sebuah produk sukses dari negosiasi multilateral yang intensif dan sabar. JCPOA menawarkan keringanan sanksi dengan imbalan kontrol yang dapat diverifikasi pada program nuklir Iran. Menurut IAEA, Iran sepenuhnya mematuhi rezim inspeksi dan pembatasan pada potensi persenjataan program nuklirnya. Trump menyatakan kemampuan dan niatnya untuk mengganti perjanjian multilateral dengan sesuatu yang lebih baik, tetapi seperti

pendekatannya terhadap kebijakan dalam negeri yang mengganti Obamacare, Trump kurang memiliki fokus dan tidak pernah menegosiasikan perjanjian lain. Yang ia hasilkan hanyalah sanksi "tekanan maksimum" yang mendorong Iran menjauhi perjanjian tersebut (Biersteker, 2025).

Meski pada masa pemerintahan Joe Biden (2021-2025), kebijakan Amerika kembali mendorong dunia kepada tatanan internasional liberal, namun semua kebijakan isolasionis Amerika dikembalikan lagi oleh Trump setelah berhasil terpilih untuk kedua kalinya dengan mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat pada 2024. Merujuk pada apa yang sudah dilakukannya pada periode pertama pemerintahannya, Trump membawa kembali Amerika meninggalkan tatanan internasional berbasis aturan. Dan dia konsisten menjalankannya dan bahkan diperluas dalam masa jabatan keduanya.

Dengan kata lain, Trump kembali menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, mengabaikan komitmen pengurangan emisi sebelumnya, dan tidak membuat rencana baru untuk pengurangan emisi. Dengan menarik diri dari Perjanjian Paris, ia dapat memblokir upaya pendanaan iklim. Ini berarti tidak ada kompromi dalam pertumbuhan ekonomi domestik. Trump juga mengkritik WHO karena dinilai gagal bertindak secara independen dari “pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggotanya” dan meminta “pendanaan yang sangat memberatkan” dari AS dibanding negara seperti China. AS seperti diketahui merupakan pendukung keuangan terbesar WHO, menyumbang sekitar 18% dari pendanaannya. Trump juga menakar biaya-manfaat dari setiap organisasi internasional (OI) di mana AS menjadi anggota, dan berpendapat bahwa OI harus dianggap sebagai kendaraan untuk mempromosikan kepentingan nasional AS.

Selain itu, Trump juga hirau dengan bantuan asing yang menurutnya telah membebankan fiskal Amerika. Keputusan Trump untuk membekukan bantuan asing

selama 90 hari dan kemudian menutup USAID untuk mengakhiri misi enam dekade menopang keamanan Amerika telah memicu reaksi keras di seluruh dunia. Banyak inisiatif penting di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan kemudian ditangguhkan.

Akibat kebijakan Trump itu, masyarakat internasional kini harus mencari sumber pendanaan alternatif, tetapi mengganti puluhan miliar dolar bukanlah pekerjaan yang mudah. Padahal, dalam hemat saya, pengurangan bantuan jangka panjang yang dilakukan Trump dapat menyebabkan peningkatan ketidakstabilan, migrasi, dan penguatan rezim otoriter di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan dukungan AS.

Yang menarik dan paling mendapat sorotan dunia adalah, kebijakan perang tarif Trump yang dikeluarkan pada 2 April 2025. Dalam kebijakan itu, Trump mengenakan tarif dasar minimum 10% pada impor dari setiap negara dan tarif yang lebih tinggi lagi secara bilateral kepada negara-negara yang membuat defisit perdagangan terbesar dengan AS. Dalam hal ini, Indonesia juga ikut terkena imbasnya: dikenakan tarif Trump sebesar 32% dan 47% untuk sejumlah barang ekspor.

Sejak itu, nama Trump menjadi sensasi internasional. Tetapi tak lama setelah kebijakan itu dikeluarkan, Trump justru menangguhkan pemberlakuan tarif timbal balik (resiprokal) terhadap lebih dari 75 negara selama 90 hari. Menariknya, penangguhan ini tidak berlaku bagi China, yang justru dikenakan tarif lebih tinggi sebagai bagian dari eskalasi perang dagang yang terus berlanjut. Keputusan ini diambil Trump menyusul kekhawatiran pasar dan upaya sejumlah negara untuk membuka jalur negosiasi. Trump menegaskan bahwa negara-negara yang tidak melakukan aksi balasan akan mendapatkan kesempatan berunding, sementara China, yang memilih membalas dengan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang AS (11/4/2025), dikenakan balik tarif baru yang lebih tinggi menjadi 245 persen oleh AS (16/4/2025).

Tetapi gilanya dari kebijakan Trump itu adalah saat memberlakukan tarif besar-besaran terhadap sekutu terdekatnya: Uni Eropa. Trump telah memberlakukan Tarif sebesar 20% pada semua barang UE dan tarif sebesar 25% pada semua impor mobil dalam upaya menghilangkan apa yang dilihat Washington sebagai defisit perdagangan yang besar. UE kemudian menanggapi dengan memperkenalkan serangkaian tarif balasan sebesar 25% pada impor AS. Akibat kebijakannya tersebut, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan ide tradisional tentang Barat yang bersatu adalah sesuatu dari masa lalu (Syarifudin, 2025). *The end of the west*.

Keputusan Trump untuk meningkatkan ketegangan perdagangan dengan China, UE, dan seluruh dunia tidak hanya tidak perlu tetapi juga merugikan diri sendiri. Dia lupa bahwa warganya yang akan membayar mahal. Kurang dari 3% konsumen China bergantung pada perdagangannya dengan AS, sedangkan konsumen Amerika jauh lebih bergantung pada barang-barang China yang terjangkau. Tarif impor China akan menyebabkan harga yang lebih tinggi untuk produk sehari-hari—elektronik, pakaian, dan barang-barang rumah tangga—yang secara langsung akan menghantam dompet Amerika. Tekanan inflasi akan meningkat, dan keluarga berpenghasilan rendah akan paling menderita. Jika kebijakan perang dagang ini terus dilanjutkan, ekonomi AS dapat terjerumus ke dalam resesi, yang selanjutnya mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Trump dan Partai Republik. Pemilihan paruh waktu 2026 akan menjadi ujian besar bagi Trump dan Partai Republik karena 435 kursi di DPR AS dan 33 dari 100 kursi di Senat AS akan diperebutkan untuk menentukan Kongres Amerika Serikat ke-120. Tiga puluh sembilan pemilihan gubernur negara bagian dan teritorial AS, serta sejumlah pemilihan negara bagian dan lokal, juga akan diperebutkan.

Walaupun sejumlah kebijakan Trump tersebut tidak populer, dia justru diberikan

kewenangan penuh tanpa hambatan konstitusional. Ini adalah warisan hukum yang diberikan Mahkamah Agung (MA) Amerika kepada Trump. Pada bulan Juni 2024 lalu, Mahkamah Agung AS telah memutuskan, dalam kasus yang diajukan oleh mantan presiden Trump, bahwa presiden menikmati kekebalan yang luas dari tuntutan pidana atas tindakan "resmi". Di sini, pengadilan telah memberikan bantuan untuk Trump dalam upayanya menghindari akuntabilitas – dan menjamin perlindungan hukum yang luas sebagai presiden. Ini sebuah keputusan penting di mana MA AS untuk pertama kalinya mengakui segala bentuk kekebalan presiden dari penuntutan.

Dengan status kekebalan hukum tersebut, Trump kini dapat memerintah tanpa hambatan. Ia bisa dengan lebih leluasa mengubah demokrasi liberal Amerika menjadi demokrasi yang iliberal. TIL AS telah berakhir, setidaknya selama era kepemimpinan Trump.

4.2 Munculnya Tatanan Dunia Multipleks

Dengan berakhirnya TIL, tatanan dunia berikut yang akan menggantikannya adalah tatanan yang diistilahkan oleh Amitav Acharya (2016, 2017, 2018, 2023); Azwar dan Maliki, 2019: 119-120) sebagai Tatanan Dunia Multiplex (TDM). Fitur utama dari tatanan dunia semacam itu adalah kekuatan dan kepemimpinan semakin tersebar.

Acharya (2014) membayangkan dunia multipleks seperti bioskop multipleks. Dalam bioskop multipleks beberapa film diputar di bioskop yang berbeda dalam satu kompleks. Gaya Hollywood mencakup film thriller dan film koboi dengan kekerasan, kejahatan, kekasaran, dan kepahlawanan sebagai tema utamanya. Film Bollywood menawarkan gairah, tragedi, lagu, dan tarian. Film kung fu yang diproduksi di Hong Kong dan Taiwan diputar di samping film patriotik dan propaganda dari China komunis. Tidak ada sutradara atau produser tunggal yang akan memonopoli perhatian atau kesetiaan

penonton untuk waktu yang lama. Penonton memiliki pilihan pertunjukan.

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, dunia multipleks akan terdiri dari beberapa aktor yang hubungannya ditentukan oleh bentuk saling ketergantungan yang kompleks. Kekaisaran yang diciptakan oleh kekuatan besar di masa lalu ada secara bersamaan di seluruh dunia: Romawi (27 SM hingga 393 M), Han (206 SM hingga 220 M) dan Maurya (322 hingga 185 SM); Bizantium (330 M hingga 1453 M), Gupta (320 hingga 550 M), dan Tang (618 hingga 907 M). Mereka memang berinteraksi, tetapi tidak sedekat atau terus-menerus seperti yang dilakukan negara-negara besar dan berkembang sekarang ini -- baik BRICS maupun anggota G20. Namun, dunia multipleks bukanlah dunia multipolar, khususnya dunia yang ada di Eropa sebelum Perang Dunia II. Salah satu alasannya, pemain kunci dalam politik global saat ini bukan hanya negara besar atau negara yang sedang naik daun, melainkan juga lembaga internasional, aktor non-negara, kekuatan dan organisasi regional, perusahaan multinasional, dan berbagai aktor global lainnya (Acharya, 2014).

Dunia Multiplex adalah dunia saat ini yang tentu saja berbeda jauh dari dunia pada periode pasca-Perang Dunia II yang menjadikan Amerika sebagai kekuatan tunggal. Dunia Multiplex juga bukan dunia multipolar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara tradisional, multipolaritas berarti memiliki banyak kekuatan negara-negara besar di dalam sistem internasional. Saat ini, dunia memiliki lebih banyak aktor (Ataman, 2003; Weiss, D. Conor, Coolidge, 2013; Risse Kappen, 1995; Bieler, Higgot, Underhill, 1999), dan berkat globalisasi, dunia jadi benar-benar saling terhubung dan saling bergantung daripada sebelumnya. Sedangkan dunia sebelum Perang Dunia, saling ketergantungan dimaknai sebagai ketergantungan dunia berkembang pada kekuatan kolonial Barat.

Itu berarti, dunia Multiplex adalah dunia dengan banyak aktor di dalam urusan global. Dan di dunia itu juga terikat oleh saling

ketergantungan yang kompleks. Karenanya, tantangannya pun jauh lebih kompleks dan bersifat transnasional. Dengan begitu, struktur kekuasaannya mesti tersebar. Tidak mungkin bagi negara mana pun, termasuk Amerika, yang bisa memimpin dan mengelola persoalan internasional secara sendirian.

Meski begitu, Acharya mengakui bahwa ini tidak berarti Amerika mengalami kemunduran. Namun, Amerika tidak lagi berada dalam posisi untuk membuat aturan dan mendominasi lembaga-lembaga tata kelola global seperti yang telah dilakukannya selama periode pasca-Perang Dunia II. Dan sementara unsur-unsur TIL lama masih bertahan, mereka harus mengakomodasi aktor dan pendekatan baru yang tidak sesuai dengan perintah dan preferensi Amerika.

Dunia multipleks juga diakui oleh Acharya (2014) tidak akan bebas dari kekacauan. Baginya, dunia ini bukanlah apa yang disebut Ian Bremmer (2012) dan David Gordon (The Friday Podcast, 2011) sebagai "Dunia G-Zero," semata-mata karena hilangnya peran kepemimpinan AS yang dominan. Stabilitas dunia multipleks akan dicapai melalui kepemimpinan bersama di antara negara-negara yang baru muncul dan yang sudah mapan serta kelompok masyarakat sipil dan regional. Dunia multipleks kini membutuhkan sistem tata kelola global yang benar-benar direformasi dan pengakuan yang lebih besar oleh Barat atas suara dan aspirasi negara-negara Lain.

Ringkasnya, fitur-fitur yang menentukan TDM dalam formulasi Acharya meliputi (2023: 2341): 1. Tidak adanya hegemoni global oleh satu negara, meskipun ketimpangan kekuasaan dan hierarki akan tetap ada. 2. Proliferasi aktor-aktor penting dalam hubungan internasional. Mereka bukan hanya negara-negara besar, seperti dalam sistem multipolar, tetapi juga negara-negara Selatan, badan-badan internasional dan regional, perusahaan-perusahaan, gerakan-gerakan sosial, masyarakat itu sendiri, dan aktor-aktor non-negara (misalnya jaringan

kriminal) yang menantang kedaulatan dan stabilitas. 3. Pola saling ketergantungan yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup perdagangan, tetapi juga arus investasi, jaringan produksi, rantai pasokan, dan tantangan-tantangan ekologis dan transnasional lainnya. 4. Arsitektur tata kelola global yang plural secara dinamis dengan arsitektur tata kelola multilevel yang muncul terdiri dari lapisan-lapisan global, regional, dan subnasional (misalnya kota-kota), masing-masing dengan lembaga-lembaga formal dan informal, jaringan-jaringan, dan struktur-struktur hibrida. 5. Dunia dengan keragaman budaya, ideologi, dan politik, yang menyediakan berbagai jalur menuju stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran.

Acharya kemudian, bersama dua rekannya, Antoni Estevadeordal dan Louis W Goodman (2023: 2343), memperluas gagasan TDM Acharya sebelumnya, dengan menambahkan gagasan tentang 'kapasitas interaksi'. Ketiganya merujuk istilah 'kapasitas interaksi' yang dikembangkan oleh Barry Buzan (2023: 19). Bagi Buzan kapasitas interaksi adalah kemampuan untuk bernegosiasi dan memformalkan kerja sama melalui perjanjian internasional, termasuk pembuatan perjanjian. Menurutnya 'perjanjian memfasilitasi interaksi, misalnya dengan membuat hukum, atau menstandarisasi praktik, atau menyiapkan jalur komunikasi. Dalam dunia yang multipleks, Acharya, Estevadeordal, dan Goodman percaya pengaruh dicapai bukan hanya melalui kekuasaan tetapi melalui kapasitas interaksi suatu negara.

4.3 Kebijakan Luar Negeri Prabowo dalam Dunia Multipleks

Pada intinya penulis bersepakat dengan gagasan TDM sebagaimana yang dikembangkan oleh Acharya, Estevadeordal, dan Goodman, sebab dunia kini tak lagi sama. Amerika di era Trump tidak lagi menjadi negara adidaya yang peduli dengan nilai-nilai liberal-nya. Dia lebih memilih mengisolasi diri

dan kerja sama yang bersifat bilateral. Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya TIL. Dalam hal ini, konsep TDM bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai sandaran yang dapat mengarahkan bagaimana seharusnya kebijakan luar negeri Indonesia dirancang dan diimplementasikan.

TDM adalah situasi global saat ini. Indonesia tentu saja mesti merespons-nya. Dulu kebijakan luar negeri Indonesia dirancang untuk merespons situasi tatanan dunia yang bersifat bipolar, saat politik internasional dikuasi oleh dua kutub (bipolaritas) yang bersaing. Situasi ini sebenarnya timbul sebagai akibat dari pergolakan politik internasional yang dikuasai oleh pertentangan Amerika dan Rusia. Saat itu negara-negara di dunia dipaksa untuk memilih apakah pro Amerika atau pro Rusia. Namun Indonesia memiliki sikap sendiri.

Pada 2 September 1948, Wakil Presiden/Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Mohammad Hatta di muka Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, telah memberikan panduan kebijakan luar negeri Indonesia untuk tidak memilih pro ini atau pro itu. Sejak itulah, politik luar negeri Republik Indonesia disebut sebagai *bebas* dan *aktif*. *Bebas* artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak mana pun; *aktif* artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.

Secara praktik, Hatta (1988: 13; 1953: 441-452; 1958: 480-490; Musa Maliki, Yohanes Sulaiman, Asrudin Azwar, Mirza Jaka Suryana, 2022: 134-149 & 150-163) menjelaskannya dengan sangat lugas: sebagai akibat pergolakan politik internasional yang dikuasai oleh pertentangan Amerika-Rusia, mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? "*Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek*

dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri."

Itu artinya situasi global sangat menentukan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dirancang. Hatta dengan jenius berhasil merancang politik bebas aktif yang tak lekang waktu. Kebijakan luar negeri bebas aktif ini telah digunakan oleh semua rezim pemerintahan Indonesia setelahnya, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi) dengan interpretasinya sendiri-sendiri.

Pun demikian dengan Presiden Prabowo. Dalam pidato pertamanya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024), dia dengan intonasi menggebu, menegaskan bahwa Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia bebas menentukan sikap terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara *a priori* pada kekuatan dunia mana pun. Dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia, akan memilih jalan nonblok. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun. Prabowo menekankan bahwa Indonesia memilih bersahabat dengan semua negara. Dia bahkan menerapkan filosofi klasik: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak (Presiden Republik Indonesia, 2025).

Kendati bersahabat dengan semua negara, Indonesia, kata Prabowo, tetap memiliki prinsip yang menjadi pegangan. Prinsip itu adalah antipenjajahan, penindasan, dan antirasialisme. Prinsip-prinsip tersebut didasari pengalaman bangsa Indonesia yang pernah terkungkung kolonialisme Belanda. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya

itu, Prabowo dibantu oleh Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Sebagai Menlu, Sugiono akan bertugas mengawal kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia dibebankan untuk menerjemahkan visi diplomasi yang diusung oleh Presiden Prabowo.

Salah satu agenda prioritas diplomasi Indonesia yang sedang dibangun oleh Menlu Sugiono adalah reformasi multilateral demi mewujudkan perkembangan dunia yang lebih inklusif dan adil bagi semua negara. Indonesia, tegasnya, akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral. Dalam hal ini, Sugiono menekankan pentingnya reformasi multilateral untuk mewujudkan "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang *fit-for-purpose*; arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif; serta memberi ruang bagi kepemimpinan Negara-Negara Selatan (*Global South*). Menurutnya, dunia saat ini menghadapi krisis yang saling berkaitan dan tidak ada kawasan manapun yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Sayangnya, kata dia, tatanan global yang ada saat ini masih belum mampu merespons dinamika konflik dunia yang semakin menegang. Kondisi global dan tantangan multilateralisme pun diperparah dengan krisis iklim yang menuntut respons bersama dari semua negara (Ihsan, 2025).

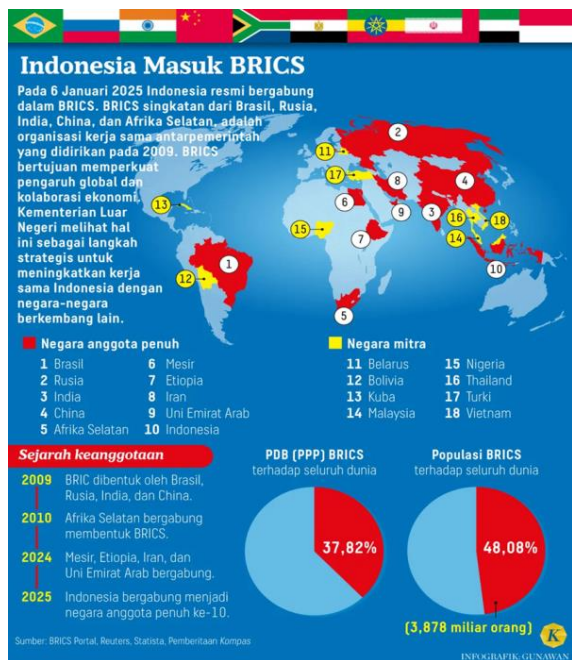
Visi diplomasi ini dijalankan Sugiono karena baginya multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin tak dihormati. Arsitektur ekonomi dunia pun tak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global. Dengan demikian, melalui peran aktif dalam berbagai forum multilateral, Indonesia akan terus mendorong penyempurnaan tata kelola global demi memastikannya tetap relevan menjawab tantangan zaman. Dukungan RI terhadap multilateralisme juga tampak dari komitmen memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, di mana

kemajuan Indonesia memenuhi capaian SDGs berada pada jalurnya, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi energi.

Persoalan-persoalan global sebagaimana yang dimaksud oleh Sugiono itu merupakan bagian dari TDM. Di sini tampak terlihat bahwa visi diplomasi Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diserukan oleh Acharya, Estevadeordal, dan Goodman mengenai pengaruh dicapai bukan hanya melalui kekuasaan tetapi melalui kapasitas interaksi suatu negara.

Sebagai anggota G20 serta ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan posisi geografis yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan nyata dalam menjaga stabilitas kawasan. Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS *sudah tepat* dan menunjukkan upaya diversifikasi kerja sama ekonomi di luar kemitraan multilateral tradisional. Organisasi ini diprakarsai Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta kini mencakup negara-negara seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA. BRICS menawarkan peluang dalam pendanaan alternatif serta perdagangan yang lebih beragam (Yadav, 2025).

Gambar 2. Dinamika keanggotaan dan Kemitraan BRICS, Tahun 2025



(Sumber: kompas.id)

BRICS kerap dipandang sebagai upaya menyeimbangkan dominasi ekonomi negara-negara Barat. Hal ini memicu spekulasi bahwa Indonesia mungkin berpeluang condong ke salah satu blok kekuatan tertentu, suatu hal yang diperdebatkan terhadap prinsip bebas dan aktif. Meski demikian, perspektif geostrategis yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia justru dapat berperan sebagai jembatan diplomasi pada wacana Indo-Pasifik, menghubungkan berbagai kepentingan global tanpa kehilangan independensinya. Sikap ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia serta melanjutkan tradisi keterlibatan dalam beragam forum multilateral (Yadav, 2025).

Dalam konteks itulah kapasitas interaksi Indonesia di Forum BRICS dalam dunia yang multipleks ini menjadi sangat menentukan. Jika diplomasi Indonesia *on the track*, hal ini akan memberi ruang bagi kepemimpinan Negara-Negara Selatan (*Global South*). Namun ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi Indonesia untuk membuat dunia multipleks bisa bekerja secara inklusif dan merepresentasikan kepentingan

negara-negara Selatan. Hal pertama yang mesti dilakukan Indonesia dalam kapasitas interaksinya adalah membuat BRICS solid dan solider. Sebab para pendiri BRICS dan anggotanya memiliki dinamika ekonomi-politik sendiri. Antar mereka masih memiliki pertentangan yang sukar dicari solusinya.

Ketegangan China-India atas sengketa perbatasan di wilayah Doklam, serta penentangan China terhadap upaya India untuk bergabung dengan *Nuclear Suppliers Group* dan upayanya untuk menambahkan kepala kelompok teroris anti-India Jaish-e-Mohammad ke dalam daftar teroris PBB, menunjukkan bahwa kedua negara BRICS yang bisa dibilang paling penting, mengingat ekonomi dan populasi mereka yang besar, tidak memiliki visi yang sama tentang tatanan dunia. Lebih jauh, meskipun India adalah anggota utama Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai China, India menentang inisiatif *One Belt, One Road* (OBOR) China. OBOR, yang juga dikenal sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI), adalah program bantuan ekonomi dan investasi China yang sangat besar yang bernilai lebih dari satu triliun dolar AS. Diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur di Eurasia dan sekitarnya. Motif China di balik inisiatif ini bersifat ekonomi (seperti memperluas pasar dan bisnis baru bagi perusahaan China), dan strategis, terutama meningkatkan pengaruh China di kawasan dan di dunia. Hal ini dikhawatirkan bisa melemahkan pengaruh India di kawasan Asia Selatan (Acharya, 2017: 275).

China dan India juga mengalami masalah legitimasi dan dukungan di lingkungan mereka masing-masing, yang semakin membatasi potensi mereka untuk mengambil peran yang lebih besar dalam tatanan dunia. China terlibat dalam sengketa teritorial yang sengit dengan Jepang atas pulau-pulau di Laut Cina Timur, dan dengan Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain atas

pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Sementara itu, hubungan India dengan negara-negara tetangganya di Asia Selatan tetap sulit, dan dapat memburuk karena meningkatnya bantuan China kepada negara-negara tetangga seperti Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka sebagai bagian dari inisiatif OBOR.

Dalam kaitan itu, Indonesia yang merupakan bagian dari BRICS dituntut kapasitas interaksinya untuk bisa membuat BRICS tetap solid dan solider. Indonesia mesti mendorong mereka yang berada di BRICS untuk menahan diri tidak berkonflik dan merapatkan barisan di tengah tatanan dunia yang multipleks: dunia yang kompleks dan penuh tantangan. Karena solid dan solidernya BRICS akan membuat negara-negara Selatan memiliki sarana interaksi alternatif yang menguntungkan secara ekonomi di tengah kebijakan perang tarif Trump. Apalagi BRICS memiliki pasar yang sangat besar di dunia. BRICS, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, plus 10 negara anggota penuh dan 8 negara mitra mewakili sebagian besar populasi dan PDB dunia. Hal ini memberikan peluang besar bagi seluruh negara di dalam BRICS untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di antara mereka, serta membuka pasar baru bagi negara-negara lain (lihat gambar di atas). Dengan begitu Indonesia akan bisa membuat tatanan dunia multipleks sebagai tatanan yang inklusif dan kondusif bagi negara-negara Selatan (*Global South*).

5. Kesimpulan

Suka atau tidak, sepakat atau tidak, apa yang disebut sebagai tatanan internasional liberal telah berakhir. Indikasinya dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Selama memerintah, baik periode pertama atau pun kedua, Trump telah menarik Amerika dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, kesepakatan nuklir Iran (Rencana Aksi Komprehensif Bersama),

Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), dan berbagai kebijakan lainnya. Serta yang paling terburuk adalah kebijakan perang tarif yang ditargetkan kepada hampir seluruh negara di dunia.

Setelah TIL berakhir, muncul-lah tatanan dunia multipleks. Tatanan ini mengacu pada sistem global di mana tidak ada satu negara atau sekelompok kecil negara yang menjalankan kendali hegemonik. Sebaliknya, berbagai aktor, termasuk kekuatan mapan, negara berkembang, organisasi internasional, aktor non-negara, dan bahkan warga negara perorangan, bisa memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola dan kerja sama global.

Peran itu yang harus dimainkan Indonesia di dalam kebijakan luar negerinya. Keputusan Indonesia masuk ke dalam BRICS dan menjadi anggota penuh adalah sebuah keputusan yang tepat di tengah tatanan dunia yang multipleks. Melalui BRICS, Indonesia bisa ikut membentuk tata kelola dan kerja sama global. Meski begitu masih terdapat tantangan yang mesti dihadapi Indonesia. Sebab, sebagai kelompok negara berkembang yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global dan sering dianggap sebagai penyeimbang dominasi negara-negara Barat, khususnya Amerika, BRICS masih menyimpan persoalan konflik di internalnya. India-China, dua negara inti BRICS, masih menaruh curiga satu sama lain dalam sejumlah isu internasional. Dan ini bisa menjadi kerikil dalam sepatu diplomasi BRICS. Tantangan kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan Prabowo adalah bagaimana membuat persoalan-persoalan itu menjadi minor agar tatanan dunia multipleks menjadi tatanan yang kondusif bagi Indonesia dan juga negara-negara Selatan lainnya.

Referensi

Acuan dari buku

- Acharya, A. 2018. *The End of American World Order*, 2nd Edition. Polity.
- Azwar, A, & Maliki, M. 2019. *Oksidentalisme: Pandangan Hassan Hanafi Terhadap Tradisi Ilmu Hubungan Internasional Barat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bieler, A, Higgott, Richard A., & Underhill, Geoffrey R. D. (Eds). 1999. *Non-State Actors and Authority in the Global System*. New Brunswick : Routledge.
- Bremer, I. 2012. *Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World*. Portfolio.
- Buzan, B. 2023. *Making Global Society: a Study of Humankind Across Three Eras*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Cipto, B. 2003. *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia: Kajian atas Kebijakan Luar Negeri Clinton Terhadap Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and the Last Man*. London.
- Hatta, M. 1988. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ikenberry, G.J. 2011. *Liberal Leviathan: the Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*. Princeton: Princeton University Press.
- Maliki, M, Sulaiman, Y, Azwar, A, Jaka Suryana, M (eds.). 2022. *Ilmu Hubungan Internasional Indonesia: Perspektif dan Pengembangannya*. Malang: Intrans Publishing.

Risse-Kappen, T. 1995. *Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.

Von Mises, L, 1985. *Liberalism: In the Classical Tradition*. New York: The Foundation for Economic Education, Inc.

Acuan artikel dalam jurnal

- Acharya, A. Fall 2017. "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order", dalam *Ethics & International Affairs*, Vol. 31, No. 3, pp. 271 – 285.
<https://doi.org/10.1017/S089267941700020X>
- Acharya, A, Estevadeordal, A, & Goodman, L.W. 2023. "Multipolar or Multiplex? Interaction Capacity, Global Cooperation and World Order", dalam *International Affairs*, Vol. 99, No. 6, pp. 2339–65,
<https://doi.org/10.1093/ia/iad242>
- Ataman, M. Fall 2003. "The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States", dalam *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, Vol. 2, No.1.
- Deudney, D. & Ikenberry, G.J. 1999. "The Nature and Sources of Liberal International Order", dalam *Review of International Studies*, Vol. 25, No. 2.
- Deudney, D, & Ikenberry, G.J. 2018. "Liberal World: The Resilient Order", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 77, No. 2.

Fukuyama, Francis. 1989. "The End of History", dalam *The National Interest*, No. 16.

Hatta, M. Apr 1953. "Indonesia's Foreign Policy", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 31, No. 3.

Hatta, M. Apr 1958. "Indonesia Between the Power Blocs", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 36, No. 3.

Ikenberry, G.J. May/June 2011. "The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 90, No. 3.

Ikenberry, G.J. July/August, 2020. "The Next Liberal Order: The Age of Contagion Demands More Internationalism", Not Less, dalam *Foreign Affairs*, Vol. 99, No. 4.

Mearsheimer, J.J. Spring 2019. "Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order", dalam *International Security*, Vol. 43, No. 4.

Nurrahman, D, & Triwahyuni, D. 2024. "Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan", dalam *Global Political Studies Journal*, Vol. 8 No. 2.

Plattner, M.F. 2002. "Liberalism and Democracy: Can't Have One Without the Other", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 77, No. 2.

Zakaria, F. 1997. "The Rise of Illiberal Democracy", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 76, No. 6.

Acuan artikel dalam koran

Azwar, Asrudin. 2017. Mencermati Kebijakan Trump, dalam *Koran Repblika*, Kamis, 26 Januari 2017.

Azwar, Asrudin. 2025. Kembalinya 'America First', dalam *Koran Pikiran Rakyat*, Jumat, 31 Januari 2025.

Azwar, Asrudin. 2025. Akhir Tatanan Liberal, dalam *Koran Pikiran Rakyat*, Kamis, 6 Maret 2025.

Azwar, Asrudin. 2025. The end of the American Liberal International Order, dalam *Koran Independent Observer*, Jumat, 21 Maret 2025.

Acuan artikel dalam website

Acharya, Amitav. 2014. "The Post-American Multiplex World"; dalam https://www.huffingtonpost.com/amitav-acharya/new-global-order_b_5582935.html diakses 10 September 2017.

Acharya, Amitav. 2023. "A Multiplex World: The Coming World Order", dalam <https://anthologies.newlinesinstitute.org/emerging-world-order-after-the-russia-ukraine-war-category/a-multiplex-world-the-coming-world-order/> diakses 20 Januari 2024.

Biersteker, Thomas. 2025. "Donald Trump and the Future of Multilateralism", dalam <https://theglobal.blog/2025/01/16/donald-trump-and-the-future-of-multilateralism/> diakses 9 Maret 2025.

Gilman, Nils. 2025. "Samuel Huntington Is Getting His Revenge", dalam <https://foreignpolicy.com/2025/02/>

21/samuel-huntington-fukuyama-clash-of-civilizations/ diakses 7 Maret 2025.

Ihsan, Nabil. 2025. "Menlu Sugiono: Reformasi multilateral jadi prioritas diplomasi RI", dalam https://www.antaranews.com/berita/4577202/menlu-sugiono-reformas-i-multilateral-jadi-prioritas-diplomasi-ri#google_vignette diakses 25 Maret 2025.

Klare, Michael T. 2025. "What 'America First' Means Second Time Around", dalam <https://mondediplo.com/2025/01/06usa> diakses 7 Maret 2025.

Leonard, Mark. 2025. "Europe After the End of the Liberal International Order", dalam <https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-after-the-liberal-international-order-by-mark-leonard-2025-04> diakses 23 April 2025

Meiser, Jeffrey W. 2018. "Introducing Liberalism in International Relations Theory", dalam <https://www.e-ir.info/2018/02/18/introducing-liberalism-in-international-relations-theory/> diakses 1 April 2025.

Presiden Republik Indonesia. 2025. "Presiden Prabowo Tegaskan Netralitas Indonesia: "Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak",

dalam <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-netralitas-indonesia-seribu-teman-terlalu-sedikit-satu-musuh-terlalu-banyak/> diakses 25 April 2025

Syarifudin. 2025. "Uni Eropa Tegaskan Barat Tidak Ada Lagi, AS Bukan Mitra Terpenting", dalam <https://international.sindonews.com/read/1556409/41/uni-eropa-tegaskan-barat-tidak-ada-lagi-as-bukan-mitra-terpenting-1744895070> diakses 25 Maret 2025.

The Friday Podcast. 2011. "G-Zero", dalam NPR Planet Money, <https://www.npr.org/sections/money/2011/01/28/132742511/the-friday-podcast-g-zero> diakses 24 April 2025.

Weiss, Thomas G., D. Conor Seyle, Kelsey Coolidge. 2013. "The Rise of Non-State Actors in Global Governance Opportunities and Limitations", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/327306-role-of-organisations-as-non-state-actor-e8b4c062.pdf> diakses 24 April 2025.

Yadav, A.S. 2025. "Arah Baru Kebijakan Luar Negeri Indonesia", dalam <https://www.kompas.id/artikel/ar-ah-baru-kebijakan-luar-negeri-indonesia> diakses 25 April 2025.